

**ANALISIS HUBUNGAN SIMULTAN ANTARA  
PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SOSIAL DALAM LAPORAN TAHUNAN  
(*ANNUAL REPORT*) DENGAN KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**MEGA PUSPITA WARDHANI  
NIM. C2C007078**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Mega Puspita Wardhani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007078  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **Analisis Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dengan Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Agus Purwanto, SE, M.Si., Akt.

Semarang, 6 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Agus Purwanto, SE, M.Si., Akt.)

NIP. 19680827 199202 100

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Mega Puspita Wardhani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007078

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **Analisis Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dengan Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Juni 2011**

Tim Penguji

1. Dr. H. Agus Purwanto, SE, M.Si., Akt. (.....)
2. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D (.....)
3. Hj. Siti Mutmainah, SE, M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mega Puspita Wardhani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dengan Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 6 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Mega Puspita Wardhani)  
NIM. C2C007078

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the simultaneous relationship between disclosure of corporate social responsibility in annual report with institutional ownership. This research is based on the understanding that between these two variables may have influence with one another. Institutional ownership can affect the disclosure of corporate social responsibility in annual report and disclosure of corporate social responsibility in annual report can affect the institutional ownership. Therefore, it is suspected that there is a simultaneous relationship between disclosure of corporate social responsibility in annual report with institutional ownership.*

*Collecting data using a purposive sampling method to non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2009. Some 93 companies are used as research samples. Hypothesis testing is done by Hausman test, the test of Two-Stage Least Square, and multiple regression analysis. This study used variable industry type, company size and profitability as a control variable of disclosures of corporate social responsibility and used variable firm size, profitability, and leverage as control variables of institutional ownership.*

*Result of research by Hausman test shows that there is no simultaneous relationship between disclosure of corporate social responsibility with institutional ownership. Therefore do not escape the Hausman test, the research does not do the test of Two-Stage Least Square. The research is continued by testing the regression model with multiple regression analysis of each regression equation. The results of regression models indicate that variables that affect disclosure of corporate social responsibility are industry type and firm size which are the control variable and variable that affect institutional ownership is profitability which is the control variable. Therefore, can be stated that institutional ownership does not affect disclosure of corporate social responsibility and also can be stated that disclosure of corporate social responsibility does not affect institutional ownership. So, can be stated that it is not formed the relationship between disclosure of corporate social responsibility with institutional ownership and can be stated that there is no simultaneous relationship between disclosure of corporate social responsibility with institutional ownership.*

**Keywords:** *Disclosure of Corporate Social Responsibility, Institutional Ownership*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa antara kedua variabel tersebut dapat memiliki pengaruh satu sama lain. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dapat mempengaruhi kepemilikan institusional. Oleh karena itu, diduga terdapat hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Sejumlah 93 perusahaan digunakan sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Hausman, uji *Two-Stage Least Square*, dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan variabel tipe industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel pengontrol dari pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel pengontrol dari kepemilikan institusional.

Hasil penelitian dengan uji Hausman menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional. Oleh karena tidak lolosnya uji Hausman, maka tidak dilakukan pengujian dengan uji *Two-Stage Least Square*. Penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi berganda terhadap masing-masing persamaan regresi. Hasil penelitian model regresi menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah tipe industri dan ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol dan variabel yang mempengaruhi kepemilikan institusional adalah profitabilitas yang merupakan variabel kontrol. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan dapat dinyatakan pula bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial tidak mempengaruhi kepemilikan institusional. Oleh karena itu, dapat pula dinyatakan bahwa tidak terbentuk arah hubungan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional dan dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional.

**Kata Kunci: Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial, Kepemilikan Institusional**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dengan Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agus Purwanto, SE, M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com., Akt. yang telah membantu Penulis dalam menentukan model penelitian untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

4. Bapak Prof. Dr. Much. Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D dan Ibu Hj. Siti Mutmainah, SE, M.Si., Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan petunjuk kepada Penulis mengenai penyusunan skripsi ini sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.
6. Bapak Surya Rahardja, SE, M.Si., Akt. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.
9. Kedua orang tua Penulis, Bapak Bambang Basuki dan Ibu Andriani Sulistyowati, SH yang telah dengan sabar mendidik dan membimbing Penulis hingga sekarang ini serta Bayu Kusuma Wardhana, adik Penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada Penulis.
10. Eyang Kakung dan (Almh.) Eyang Ucuk serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat LEGI, Rini, Fika, Prima, Ririn, Tika, Mbak Maya, Jeremy, dan Adistya. Terimakasih atas perhatian, dukungan, dan kekompakan yang telah diberikan dan terjalin selama kita duduk di bangku perkuliahan.

12. Teman-teman sepermainan, Hari “Cowok” Utomo, Hari “Syur” Suryono, Jackson, Samin, Amel, Bebek, Ratih, dan Hana. Terimakasih atas waktu dan kesenangan yang telah dihabiskan bersama dan arti pertemanan yang tulus.
13. Teman-teman KKN Pedurungan Kidul 2010, yang telah menjadi keluarga baru bagi Penulis. Sungguh kedekatan dan persahabatan yang mengesankan walaupun hanya beberapa bulan kita bersama.
14. Teman-teman Geng-Gong, terimakasih atas arti pertemanan yang tulus yang tetap terjalin hingga sekarang dan semoga tetap terjalin dengan baik.
15. Teman-teman seperjuangan, Caca, Grace, Murni, Yayak, Teye, Seno, Yogi, dan seluruh teman-teman Akuntansi UNDIP Angkatan 2007. Terimakasih atas pertemanan, kedekatan, dan kebaikan yang telah diberikan.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan serta mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 6 Juni 2011  
Penulis

(Mega Puspita Wardhani)  
NIM: C2C007078

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle.  
The other is as though everything is a miracle” (Albert Einstein)*

*“Life must go on and keep fighting to get everything that you want”*

*“Keep doing everything with your heart”*

*“Happiness will come after and we can feel it so deep after we passed it with so  
much and heavy pressures and difficulties”*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Bapak, Ibu, dan Adikku Tercinta*

*Keluarga Besarku*

*Sahabat dan Teman-temanku*

*Almamaterku*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABELI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	16
1.4 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Landasan Teori.....	19

2.1.1	Teori <i>Stakeholder</i> .....	20
2.1.2	Teori Legitimasi .....	21
2.1.3	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan .....	24
2.1.4	Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) .....	29
2.1.5	Kepemilikan Institusional ( <i>Institutional Ownership</i> ).....	32
2.1.6	Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) dengan Kepemilikan Institusional.....	33
2.1.7	Variabel Eksogen .....	38
2.1.7.1	Tipe Industri .....	38
2.1.7.2	Ukuran Perusahaan .....	39
2.1.7.3	Profitabilitas .....	40
2.1.7.4	<i>Leverage</i> .....	44
2.2	Penelitian Terdahulu .....	47
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	52
2.4	Hipotesis .....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		59
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	59
3.1.1	Variabel Penelitian.....	59

3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	60
3.1.2.1	Variabel Endogen.....	60
3.1.2.2	Variabel Eksogen .....	63
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian .....	68
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	69
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	70
3.5	Metode Analisis .....	70
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif .....	70
3.6	Uji Hipotesis .....	70
3.6.1	Pengujian Identifikasi .....	72
3.6.2	Uji Simultanitas .....	74
3.6.3	Uji <i>Two-Stage Least Square</i> (2SLS).....	75
3.7	Pengujian Model Regresi .....	76
3.7.1	Uji Asumsi Klasik.....	77
3.7.1.1	Uji Normalitas.....	77
3.7.1.2	Uji Multikolinieritas.....	79
3.7.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	80
3.7.2	Analisis Regresi .....	81
3.7.2.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	82
3.7.2.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	83
3.7.2.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	84
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....		85

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	85
4.1.1	Deskripsi Umum Penelitian .....	85
4.1.2	Deskripsi Sampel Penelitian .....	87
4.1.2.1	Variabel Endogen.....	87
4.1.2.1.1	Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan ( <i>Annual Report</i> ) .....	87
4.1.2.1.2	Kepemilikan Institusional ( <i>Institutional Ownership</i> ).....	90
4.1.2.2	Variabel Eksogen .....	91
4.2	Analisis Data.....	92
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif .....	92
4.3	Uji Hipotesis .....	95
4.3.1	Pengujian Identifikasi .....	96
4.3.2	Uji Simultanitas .....	96
4.4	Pengujian Model Regresi.....	98
4.4.1	Uji Asumsi Klasik.....	98
4.4.1.1	Uji Normalitas.....	98
4.4.1.2	Uji Multikolinieritas.....	101
4.4.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	102
4.4.2	Analisis Regresi .....	105
4.4.2.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	106
4.4.2.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	107

4.4.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	108
4.5 Interpretasi Hasil .....	110
BAB V PENUTUP .....	122
5.1 Simpulan .....	122
5.2 Keterbatasan.....	123
5.3 Saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	131

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	48
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	65
Tabel 4.1	Ringkasan Pemilihan Sampel Penelitian .....	86
Tabel 4.2	Daftar Jumlah Sampel Perusahaan pada Sektor Industri .....	86
Tabel 4.3	Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Berdasarkan Sektor Industri.....	88
Tabel 4.4	Distribusi Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Berdasarkan Tema Pengungkapan .....	90
Tabel 4.5	Ringkasan Kepemilikan Institusional dalam Perusahaan .....	91
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	92
Tabel 4.7	Distribusi Tipe Industri Sampel Penelitian .....	93
Tabel 4.8	Identifikasi Persamaan Simultan.....	96
Tabel 4.9	Hasil Uji Hausman .....	97
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinieritas-Model Regresi I.....	102
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinieritas-Model Regresi II.....	102
Tabel 4.12	Hasil Uji Glejser-Model Regresi I .....	104
Tabel 4.13	Hasil Uji Glejser-Model Regresi II.....	105
Tabel 4.14	Hasil Pengujian Model Regresi .....	106
Tabel 4.15	Ringkasan Hasil Penelitian .....	121

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian.....	54
Gambar 4.1	Grafik Histogram-Model Regresi I .....	99
Gambar 4.2	Grafik Histogram-Model Regresi II .....	99
Gambar 4.3	Grafik Normal P-Plot-Model Regresi I.....	100
Gambar 4.4	Grafik Normal P-Plot-Model Regresi II.....	100
Gambar 4.5	Grafik <i>Scatterplot</i> -Model Regresi I.....	103
Gambar 4.6	Grafik <i>Scatterplot</i> -Model Regresi II .....	103

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial .....	132
Lampiran B	Daftar Sampel Penelitian .....	136
Lampiran C	Tabulasi Data Penelitian .....	140
Lampiran D	<i>Output</i> SPSS Statistik Deskriptif .....	145
Lampiran E	<i>Output</i> SPSS Uji Hausman .....	146
Lampiran F	<i>Output</i> SPSS-Model Regresi I .....	149
Lampiran G	<i>Output</i> SPSS-Model Regresi II.....	153

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan memiliki tanggung jawab yang tidak hanya dalam segi keuangan tetapi juga tanggung jawab dalam segi sosial. Perusahaan perlu menyadari bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal melainkan juga dipengaruhi oleh masyarakat dan lingkungan atau komunitas di sekitar perusahaan (Rahman, 2009). Selain itu, pada masa sekarang ini, terjadi perubahan paradigma dari masyarakat dan lingkungan terhadap perusahaan. Salah satu perubahan paradigma tersebut adalah adanya perubahan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Chapple dan Moon, 2005 dalam Saleh, *et al.*, 2010). Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu hanya pada kondisi keuangan (Untung, 2008). Namun, dengan berkembangnya konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997, perusahaan kini dihadapkan pada tiga konsep yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila

orientasi perusahaan bergeser dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja ekonomi, kini juga harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan berbagai dampak sosial (Hadi, 2011).

Pelaksanaan CSR yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari perusahaan kepada masyarakat (sosial) dan lingkungan melanda dunia bisnis secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Dengan diberlakukannya beberapa peraturan dan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dalam pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Nomor KEP-04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Miliki Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang menyatakan adanya peran dari BUMN untuk melaksanakan PKBL, praktik CSR di Indonesia telah diubah dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu praktik tanggung jawab yang wajib (*mandatory*) dilaksanakan oleh perusahaan.

Dengan adanya ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan menuntut perusahaan untuk terlibat dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk

melakukan suatu pertanggungjawaban sosial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan atau yang disebut dengan *stakeholder*. Freeman (1984 dalam Moir, 2001) menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu rangkaian hubungan atas para *stakeholder*. Kemudian Gray *et al.* (1995) menyatakan bahwa antara perusahaan dengan *stakeholder* terdapat suatu hubungan dan oleh Robert (1992 dalam Gray *et al.*, 1995) dinyatakan bahwa CSR merupakan perantara yang relatif berhasil menjelaskan dan menegosiasikan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder* tersebut.

Kok *et al.* (2001 dalam Saleh, *et al.*, 2010) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu pernyataan umum yang mengindikasikan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan yang dilakukan guna menyediakan dan memberikan kontribusi kepada *stakeholder*. Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang memerlukan dukungan *stakeholder*. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan ditujukan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mewujudkan harmonisasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang.

Pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan perlu disampaikan kepada *stakeholder*. Adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, memiliki akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang semakin baik, memaksa perusahaan untuk memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan (Anggraini, 2006). Oleh karena itu, perlu adanya pengungkapan atas pertanggungjawaban sosial yang dilakukan

perusahaan. Salah satu media pengungkapan tersebut adalah melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (Jenkins dan Yakovleva, 2005 dalam Muniandy dan Barnes, 2010). Pengungkapan pertanggungjawaban sosial memainkan peranan penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan setiap aktivitas atau operasional perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Praktik pengungkapan (*disclosure*) di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan seperti dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2009 dan peraturan mengenai pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang dikeluarkan oleh Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia. Selain itu, dalam Pasal 66 ayat 2 UUPM No. 40 tahun 2007 juga disebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan diantaranya juga memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan *stakeholder* tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya (Darwin, 2007 dalam Djakman dan Machmud 2008) dan adanya pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan merupakan suatu bentuk dialog antara perusahaan dengan *stakeholder* (Gray, *et*

*al.*,1995). Selain itu, perusahaan juga akan memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (Oliver, 1991, Haniffa dan Coke, 2005, Ani, 2007 dalam Djakman dan Machmud, 2008).

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan memberikan informasi yang berguna bagi *stakeholder*, termasuk kepada investor sebagai pihak yang menanamkan modal pada perusahaan. Zuhroh dan Sukmawati (2003) menyatakan bahwa hasil penelitian di beberapa negara yang telah maju membuktikan saat ini investor memasukkan informasi yang berkaitan dengan masalah kelestarian lingkungan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Djohan Pinnarwan (dalam Zuhroh dan Sukmawati, 2003) menyatakan bahwa para investor cenderung melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup atau perusahaan yang mempunyai standar tinggi dalam masalah sosial dan lingkungan hidup.

Zuhroh dan Sukmawati (2003) menemukan bukti empiris bahwa pengungkapan sosial dalam laporan tahunan berpengaruh terhadap reaksi investor yang dicerminkan dengan *volume* perdagangan saham perusahaan yang mengalami peningkatan. Hal ini berarti adanya tanggapan yang positif dari investor terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Demikian pula yang dinyatakan oleh Fauzi *et al.* (2007) yaitu bahwa banyak investor mengutamakan

melakukan penanaman modal pada perusahaan dengan tingkat kinerja sosial perusahaan yang tinggi.

Perkembangan ekonomi global menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan oleh investor institusional. Saleh *et al.* (2010) menyatakan bahwa iklim investasi di dunia telah terjadi peningkatan jumlah saham atau kepemilikan oleh investor institusional, seperti sekitar 60% jumlah saham yang beredar di Amerika Serikat dikendalikan oleh investor institusional dan sekitar 51% saham yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan *go public* di Malaysia yang menduduki peringkat perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dikendalikan oleh investor institusional.

Selain itu, dalam pasar modal global, terdapat suatu *trend* penerapan indeks perdagangan saham yang memasukkan kategori saham-saham perusahaan yang telah melaksanakan CSR. Sebagai contoh, *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) yang diperuntukkan bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *Corporate Sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Demikian pula dengan *London Stock Exchange* yang memiliki *Socially Responsible Investment* (SRI) *Index* dan *Financial Times Stock Exchange* (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001. Penerapan indeks ini mulai diikuti oleh otoritas bursa saham di Asia, seperti di *Hanseng Stock Exchange* dan *Singapore Stock Exchange*. Dengan adanya indeks-indeks tersebut, mendorong investor institusional global seperti perusahaan dana pensiun dan asuransi untuk menanamkan dananya di perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam indeks perdagangan saham tersebut (Solihin, 2009).

Kepemilikan institusional (*Institutional Ownership-IO*) merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Djakman dan Machmud, 2008 dan Saleh *et al.*, 2010). Kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar, yaitu lebih dari 5%, mengindikasikan adanya kemampuan investor institusional untuk melakukan *monitoring* kepada manajemen perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008). Investor institusional memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan sehingga dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

Namun demikian, Cox *et al.* (2004) menyatakan bahwa kini telah terjadi peningkatan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi dimana salah satu *trend* yang mendasari hal tersebut adalah adanya peningkatan atas pergerakan *socially responsible investment* (SRI) sehingga dapat merangsang ketertarikan investor pada aspek perilaku perusahaan dibandingkan kinerja keuangan perusahaan (Social Investment Forum, 2002; Sparkes, 2000; UK Social Investment Forum, 2000 dalam Cox, *et al.*, 2004).

Spicer (1978 dalam Graves dan Waddock, 1994) menyatakan bahwa investor institusional menyadari bahwa perusahaan dengan tingkat kinerja sosial yang rendah merupakan suatu investasi yang berisiko. Risiko yang timbul dengan berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat kinerja sosial yang rendah, dikarenakan adanya kemungkinan sanksi berupa sejumlah dana yang harus

dikeluarkan oleh perusahaan sebagai hasil dari penyelewengan terhadap peraturan, keputusan pengadilan, dan lain-lain. Investor mempertimbangkan risiko dan *return* yang akan terjadi dan diperoleh dalam melakukan penanaman modal dalam suatu perusahaan. Dengan perusahaan memiliki tingkat kinerja sosial yang tinggi, akan mengurangi risiko terhadap investasi yang akan dilakukan perusahaan. Sehingga hal ini akan menjadi pendorong bagi institusi untuk melakukan investasi pada perusahaan dengan tingkat pertanggungjawaban sosial tinggi.

Demikian pula yang dinyatakan oleh Cox *et al.* (2004) bahwa investor institusional tidak akan mempertimbangkan perusahaan dengan kinerja sosial yang rendah pada pengambilan keputusan investasi yang dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan risiko pada perusahaan tersebut yang dalam jangka panjang dapat mengarahkan pada rendahnya kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan kepemilikan institusional dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial atau kinerja sosial perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Graves dan Waddock (1994) meneliti hubungan kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan dan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan dan terdapat hubungan positif namun tidak signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan persentase kepemilikan saham

perusahaan oleh institusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya kinerja sosial pada perusahaan, tidak memberikan tanggapan yang negatif dari investor institusional.

Cox *et al.* (2004) meneliti hubungan kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan investor institusional yang memiliki orientasi kepemilikan dalam jangka panjang (*long-term investor*) dan investor institusional yang memiliki orientasi kepemilikan dalam jangka pendek (*short-term investor*). Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan investor institusional yang memiliki orientasi kepemilikan jangka panjang dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan *short-term investor*. Hasil penelitian menyatakan bahwa investor institusional lebih memilih melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki praktik kinerja sosial yang bagus.

Mahoney dan Robert (2007) meneliti hubungan kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dengan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional. Demikian pula hasil penelitian oleh Saleh *et al.* (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepemilikan institusional dan menyatakan bahwa investor institusional mempertimbangkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial

perusahaan pada keputusan investasi yang akan diambil dan tertarik pada bagaimana manajer perusahaan menangani isu sosial yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, terdapat penelitian yang menemukan bukti empiris tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial atau kinerja sosial perusahaan. Fauzi *et al.* (2007) meneliti hubungan kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dengan kepemilikan institusional dengan sampel perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja sosial perusahaan dan menyatakan bahwa investor institusional tidak mempertimbangkan kinerja sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan.

Djakman dan Machmud (2008) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik yang *listing* di BEI pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

Muniandy dan Barnes (2010) meneliti hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa kinerja sosial perusahaan tidak berhubungan signifikan dengan kepemilikan institusional dan menyatakan bahwa investor institusional lebih memilih melakukan investasi pada perusahaan besar.

Rawi dan Muchlish (2010) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI pada tahun 2005 hingga tahun 2007. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hasil penelitian dari penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

Penelitian ini berdasarkan pula pada pemahaman bahwa *stakeholder* yang merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan dapat mempengaruhi pemakaian sumber ekonomi berdasarkan pada *power* yang dimiliki *stakeholder* tersebut (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Sehingga dapat dinyatakan bahwa investor institusional dengan kepemilikan cukup besar dalam perusahaan (lebih dari 5%), dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, dengan adanya pemahaman bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan batasan atau norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada (Suchman, 1995 dalam Rawi dan Muchlish, 2010). Apabila dikaitkan dengan praktik pertanggungjawaban sosial di Indonesia yang telah menjadi praktik pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yaitu dengan diberlakukannya beberapa peraturan dan perundangan, hal ini mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan di Indonesia.

Sementara, di sisi lain, apabila perusahaan tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan dan perundangan tersebut, akan menimbulkan risiko bagi

investor institusional yang melakukan penanaman modal pada perusahaan. Hal ini terkait dengan sanksi berupa sejumlah dana yang harus dikeluarkan perusahaan karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kemampuan finansial perusahaan sehingga dapat menimbulkan risiko investasi bagi investor institusional yang melakukan penanaman modal pada perusahaan.

Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional diduga dapat memiliki dua arah hubungan yaitu pengungkapan pertanggungjawaban sosial dapat berpengaruh terhadap kepemilikan saham oleh investor institusional dalam perusahaan dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) atau dapat dinyatakan bahwa antara dua variabel utama tersebut dapat terbentuk hubungan timbal balik atau hubungan simultan.

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menguji kembali hubungan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional namun dengan memiliki fokus penelitian pada menguji hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah menganalisis hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional.
2. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel eksogen yaitu tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Variabel tipe industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas merupakan variabel eksogen untuk pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* merupakan variabel eksogen untuk kepemilikan institusional. Pada penelitian terdahulu, variabel-variabel tersebut diperlakukan sebagai variabel kontrol dan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan baik terhadap pengungkapan pertanggungjawaban maupun terhadap kepemilikan institusional namun terdapat hasil penelitian yang masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali variabel-variabel tersebut untuk mengetahui hubungannya dengan variabel utama pada penelitian ini.
3. Periode penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2009 sehingga dapat memberikan informasi terbaru dan terkini mengenai praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan kepemilikan institusional pada perusahaan non-keuangan di Indonesia yang diketahui memiliki aktivitas operasional erat kaitannya dengan dampak yang dapat ditimbulkan bagi lingkungan dan memiliki jumlah saham yang beredar dan *volume* perdagangan yang relatif besar. Meskipun pelaksanaan dan pengungkapan

pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah menjadi praktik yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, penelitian ini tetap melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan pasca diberlakukannya peraturan dan perundangan yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melaksanakan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dengan Kepemilikan Institusional (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Di satu sisi, kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) yaitu dengan kepemilikan institusional yang besar (>5%) dalam perusahaan, dapat melakukan *monitoring* kepada manajemen. Investor institusional memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan dalam perusahaan sehingga dapat mengarahkan manajemen untuk memberikan penekanan pada pelaksanaan dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

Sementara, di sisi lain, pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) memiliki pengaruh terhadap kepemilikan institusional. Perusahaan dengan kinerja sosial yang rendah dapat menimbulkan risiko investasi yang tinggi bagi investor. Investor institusional tidak akan mempertimbangkan perusahaan dengan kinerja sosial yang rendah dalam keputusan investasi yang akan diambil. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dalam risiko investasi oleh institusi yang dalam jangka panjang, hal ini akan mengarahkan pada kinerja keuangan perusahaan yang rendah. Sementara, dengan adanya pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan, akan mengurangi risiko investasi oleh investor institusional sehingga akan mendorong investor institusional untuk melakukan penanaman modal pada perusahaan tersebut.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa terdapat penelitian yang menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional dan masih terdapat hasil penelitian yang menunjukkan ketidakkonsistenan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus penelitian pada pengujian hubungan timbal balik atau simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah

terdapat hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional?''.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Investor, dapat memberikan informasi kepada investor mengenai bagaimana praktik pertanggungjawaban sosial perusahaan-perusahaan non-keuangan di Indonesia sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi dalam suatu perusahaan tertentu.
2. Bagi Perusahaan, dapat memberikan gambaran, dukungan, dan/atau menyadarkan perusahaan mengenai pentingnya melakukan suatu pertanggungjawaban sosial. Hal ini dikarenakan dari penelitian ini perusahaan dapat mengetahui apakah terdapat hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional.
3. Bagi Akademisi, dapat memberikan sumbangsih ilmu dan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kompleks mengenai hubungan simultan antara

pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional.

4. Bagi Pemerintah, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep mengenai bagaimana praktik pertanggungjawaban sosial di Indonesia. Sehingga ke depannya setiap langkah yang diambil oleh pemerintah seperti penetapan suatu undang-undang atau peraturan perlu memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di Indonesia.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi penelitian yang diadakan selanjutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi ini:

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kerangka pemikiran teoritis yang melandasi timbul atau ditetapkannya hipotesis penelitian.

3. Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

4. Bab IV: Hasil Dan Analisis

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

5. Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Stakeholder*

*Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan yang diantaranya meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain. Gray, *et al.* (1994 dalam Ghozali dan Chariri, 2007) menyatakan bahwa:

“Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*-nya”.

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan diri atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Hal ini ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan (*power*) yang dimiliki oleh *stakeholder* atas sumber ekonomi tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori *stakeholder* berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk *me-manage stakeholder* (Gray *et al.*, 1997 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk mengatur *stakeholder* tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Perusahaan dapat mengadopsi strategi aktif atau strategi pasif. Yang dimaksud strategi aktif adalah apabila perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasi dengan *stakeholder* yang dipandang berpengaruh atau penting. Hal ini menunjukkan bahwa strategi aktif tidak hanya mengidentifikasi *stakeholder* tetapi juga menentukan *stakeholder* mana yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber ekonomi ke dalam perusahaan. Perhatian yang besar terhadap *stakeholder* akan mengakibatkan tingginya tingkat pengungkapan informasi sosial dan tingginya kinerja sosial perusahaan. Perusahaan yang mengadopsi strategi pasif cenderung tidak terus menerus memonitor aktivitas *stakeholder* dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik perhatian *stakeholder*. Akibatnya adalah rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja sosial perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* menjadi pertimbangan utama perusahaan dalam melaksanakan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*).

Mitchell *et al.* (1997 dalam Hoffman, 2007) menyatakan bahwa berdasarkan pada teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab kepada

setiap kelompok atau individu yang dapat atau telah terpengaruh oleh kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan.

Saleh, *et al.* (2010) menyatakan bahwa teori *stakeholder* berguna dalam menjelaskan CSR. Hal ini dikarenakan teori *stakeholder* mampu membedakan antara isu sosial dengan *stakeholder*. Clarkson (1995 dalam Saleh, *et al.*, 2010) berpendapat bahwa manajer sepakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan *stakeholder* dan melaporkannya kepada *stakeholder* (Guthrie *et al.*, 2004 dalam Erwansyah, 2009). Para *stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui semua informasi baik informasi *mandatory* maupun *voluntary* serta informasi keuangan dan non-keuangan. Dampak aktivitas perusahaan kepada *stakeholder* dapat diketahui melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa informasi keuangan dan non-keuangan (sosial).

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas, ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rawi dan Muchlish, 2010).

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007), teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa:

“Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”.

Gray *et al.* (1995) menyatakan bahwa pelaporan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi pemerintah.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer (1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007), hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, hal tersebut dapat dipandang sebagai legitimasi perusahaan. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan aktual diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori legitimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Selain itu juga dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh

karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.

Legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensi bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs, 1990, Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007; O'Donovan, 2002).

Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan "*legitimacy gap*" dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Untuk mengurangi *legitimacy gap* tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada perusahaan (Neu *et. al*, 1998 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

### **2.1.3 *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan**

Berbagai definisi mengenai pertanggungjawaban sosial atau CSR telah dikemukakan oleh banyak pihak. Seperti Darwin (2004 dalam Rawi dan Muchlish, 2010) yang mendefinisikan CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.

*The World Business Council for Sustainable Development* (2000 dalam Moir, 2001) mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku dengan etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya. Demikian pula terhadap masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi dan terhadap masyarakat luas.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan paradigma yakni perubahan dari pandangan tradisional terhadap bisnis yang hanya mementingkan perolehan *profit*. Praktik bisnis pada masa sekarang ini tidak terbatas pada tujuan pembuatan *profit* tetapi juga meliputi elemen CSR dan akuntabilitas (Ghazali, 2007).

Konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 memberikan suatu terobosan besar bagi perkembangan CSR pada era tahun 1990-an hingga sekarang yang memasuki masa perkembangan globalisasi (Hadi, 2011). Konsep *triple bottom line* menjelaskan bahwa CSR memiliki tiga elemen penting yaitu:

1. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *Profit*, yaitu untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
2. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap *People*, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan masyarakat.
3. Perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap *Planet*, yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Di Indonesia, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR diatur dalam beberapa peraturan atau perundangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam Pasal 74 (1) yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu pada Pasal 15 (b) yang menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pada Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Menurut Carroll (1999), konsep CSR memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Economic Responsibilities*

Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam aspek ekonomi yaitu keberadaan perusahaan didasarkan pada tujuan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga bertanggungjawab kepada kreditur yaitu menjamin bahwa perusahaan dapat mengembalikan pinjaman dan bunga yang mengikat perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam aspek ekonomi mendominasi pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*. Hal ini dikarenakan tanggung jawab ekonomi merupakan prasyarat agar dapat melaksanakan tanggung jawab yang lain yaitu tanggung jawab legal, etis, dan kemitraan.

2. *Legal Responsibilities*

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi peraturan yang berlaku dan operasional perusahaan dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundangan.

3. *Ethical Responsibilities*

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aktivitas operasional yang dilakukan dengan norma sosial dan etika yang berlaku. Tanggung jawab

etis bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan pengharapan *stakeholder* terhadap perusahaan.

#### 4. *Philanthropic Responsibilities*

Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan fisik sekitar perusahaan. Perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya berupa pemberian sejumlah fasilitas dan dana, tetapi juga adanya tanggung jawab perusahaan untuk memupuk kemandirian masyarakat sekitar seperti perbaikan secara mikro dan makrososial terhadap masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Perusahaan merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang menanggung akibat negatif dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembalikan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat, perbaikan kerusakan yang ditimbulkan, dan lain-lain.

Menurut Daniri (2008), terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan melaksanakan CSR yaitu bersifat dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dalam perusahaan (*internal drivers*). Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pendorong dari dalam perusahaan terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (*stakeholder*), termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*). Selanjutnya,

Wibisono (2007 dalam Rahman, 2011) menyatakan terdapat tiga cara pandang perusahaan terhadap pelaksanaan CSR yaitu:

1. Perusahaan melaksanakan CSR sekedar basa-basi dan adanya unsur keterpaksaan untuk melaksanakan CSR (*external drivers*). Aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk membangun *image* positif dan meningkatkan simpati masyarakat terhadap perusahaan sehingga CSR yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek dan tidak mendorong pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
2. Perusahaan melaksanakan CSR dalam rangka memenuhi kewajiban yaitu tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan lebih didasarkan kepada adanya anjuran regulasi yang harus dipatuhi (*external drivers*), seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan agar dapat diterima oleh lingkungan dan/atau komunitas sekitar perusahaan.
3. Perusahaan melaksanakan CSR sebagai bagian dari aktivitas perusahaan yang berarti bahwa CSR tumbuh secara internal (*internal drivers*). Sehingga aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dan sebagai investasi dalam jangka panjang yang dapat mendukung keunggulan perusahaan.

Dengan perusahaan menerapkan dan melaksanakan CSR, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Menurut Untung (2008), manfaat tersebut antara lain: (1) mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, (2) mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, (3) mereduksi

risiko bisnis perusahaan, (4) melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, (5) membuka peluang pasar yang lebih luas, (6) mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, (7) memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*, (8) memperbaiki hubungan dengan regulator, (9) meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan (10) adanya peluang untuk memperoleh penghargaan.

Dengan perusahaan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan CSR, berharap mendapatkan tanggapan positif oleh para pelaku pasar (Kiroyan, 2006 dalam Djakman dan Machmud 2008).

#### **2.1.4 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*)**

Hendriksen (1997) mendefinisikan pengungkapan (*disclosure*) sebagai penyajian informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dapat bersifat pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial disebut juga dengan *social disclosure*, *corporate social reporting*, dan *social reporting* (Mathews, 1995 dalam Sembiring, 2006) yaitu merupakan proses mengkomunikasikan dampak

sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan terhadap perusahaan secara keseluruhan.

Deegan (2002) menyatakan beberapa alasan perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan, diantaranya adalah:

1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*). Atas dasar alasan ini, praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan dan manajer tidak peduli dengan *cost* yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut.
4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka, cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan lingkungannya.
5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat.
6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
7. Untuk *manage* kelompok *stakeholder* tertentu yang *powerful*.
8. Untuk menarik dana investasi.

9. Untuk mematuhi persyaratan industri (*code of conduct*) tertentu. Sehingga terdapat tekanan tertentu untuk mematuhi aturan tersebut yang selanjutnya dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan.
10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Hal ini memiliki implikasi positif terhadap reputasi perusahaan pada *stakeholder*.

Di Indonesia, pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan praktik pengungkapan yang wajib (*mandatory disclosure*) dilaksanakan bagi perusahaan karena telah diatur dalam beberapa peraturan dan perundangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan diantaranya adalah pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pedoman pengungkapan pertanggungjawaban sosial di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12, yang berbunyi sebagai berikut:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang ada di Indonesia diberikan suatu kebebasan dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Peraturan mengenai perlunya pengungkapan oleh perusahaan juga diberikan oleh Bapepam. Bapepam selaku lembaga yang mengatur dan

mengawasi pelaksanaan pasar modal dan lembaga keuangan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan mengenai pengungkapan (*disclosure*) yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang *go public*. Peraturan tersebut, yaitu dalam Peraturan Bapepam No. VIII G.2 mengenai *annual report*, dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri informasi.

### **2.1.5 Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*)**

Kepemilikan institusional merupakan salah satu struktur kepemilikan dalam perusahaan yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perbankan, dana pensiun, dan kepemilikan institusi lain (Djakman dan Machmud, 2008 dan Saleh *et al.*, 2010).

Apabila dibandingkan dengan investor individual yang cenderung membeli saham dalam jumlah kecil untuk memperoleh *return* sejumlah dana yang diinvestasikan, investor institusional memegang dan memperdagangkan sejumlah besar saham serta memiliki pengalaman dalam hal keuangan dan melakukan atau membuat investasi dalam jumlah yang besar sehingga cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam perusahaan dibandingkan dengan investor individual. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi dan secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen. Investor institusional dapat bertindak sebagai pihak yang melakukan *monitoring* kepada manajemen perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008).

Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. *Monitoring* tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila investor institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. Lebih lanjut dinyatakan oleh Shleifer dan Vishny (1986 dalam Djakman dan Machmud, 2008) bahwa *institutional shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan.

#### **2.1.6 Hubungan Simultan antara Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) dengan Kepemilikan Institusional**

Pertanggungjawaban sosial merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan melakukan kegiatan operasional.

Pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan perlu diungkapkan dalam suatu media guna memenuhi kebutuhan informasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*). *Stakeholder* membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosial

(Anggraini, 2006). Salah satu media yang dapat digunakan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial adalah melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan (Jenkins dan Yakovleva, 2005 dalam Muniandy dan Barnes, 2010).

Salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah investor. Zuhroh dan Sukmawati (2003) menemukan bukti empiris bahwa pengungkapan pertanggungjawaban sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi investor yang tercermin melalui peningkatan *volume* perdagangan saham perusahaan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa investor mempertimbangkan pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan pada keputusan investasi yang diambil.

Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk melakukan *monitoring* kepada manajemen (Djakman dan Machmud, 2008).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam melakukan pengawasan (*monitoring*) kepada manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk melakukan pengawasan kepada manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin efisien

pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunan perusahaan untuk transparansi kepada *stakeholder*, untuk memperoleh legitimasi, dan untuk menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan (Brancato dan Gaughan, 1991 dalam Fauzi, *et al.*, 2007). Hal ini berarti, di satu sisi, kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Namun, di sisi lain, dalam melakukan penanaman modal, investor institusional perlu mempertimbangkan kondisi perusahaan yang akan dilakukan penanaman modal. Kondisi perusahaan yang dimaksud tidak hanya kondisi keuangan tetapi juga bagaimana keterlibatan perusahaan dalam masyarakat dan/atau lingkungan sekitar atau dengan kata lain bagaimana praktik pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Belkaoui (2006) menyatakan bahwa saat ini, investor mengandalkan informasi sosial yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan untuk membuat keputusan investasi.

Graves dan Waddock (1994) melakukan penelitian pengaruh kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) terhadap kepemilikan insitusional yang diukur dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan dan persentase kepemilikan oleh institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan

jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan. Sementara terdapat hubungan positif namun tidak signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan persentase saham perusahaan yang dimiliki institusi.

Cox *et al.* (2004) menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional yang memiliki orientasi kepemilikan dalam jangka panjang. Sementara tidak terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja sosial perusahaan dengan investor institusional yang memiliki orientasi kepemilikan dalam jangka pendek. Investor institusional tidak akan mempertimbangkan perusahaan yang memiliki kinerja sosial yang rendah pada pengambilan keputusan investasi yang dilakukan dikarenakan adanya peningkatan tekanan atas risiko pada perusahaan tersebut yang dalam jangka panjang dapat mengarahkan pada rendahnya kinerja keuangan perusahaan.

Mahoney dan Roberts (2007) yang melakukan penelitian pada hubungan kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional.

Saleh *et al.* (2010) meneliti hubungan pengungkapan CSR dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan dan persentase kepemilikan saham oleh institusi. Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional baik itu yang diproksikan dengan jumlah institusi maupun persentase

kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Investor institusional tidak akan mempertimbangkan perusahaan dengan kinerja sosial yang rendah pada keputusan investasi yang diambil dan tertarik pada bagaimana manajer perusahaan menangani isu-isu sosial yang ada di perusahaan dan berkembang di masyarakat.

Namun demikian, terdapat penelitian yang menemukan bukti tidak terdapatnya hubungan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional. Fauzi *et al.* (2007) yang melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja sosial perusahaan dengan sampel perusahaan di Indonesia menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja sosial. Selain itu, juga menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia belum siap menerapkan UU No. 40 Tahun 2007 dan menyatakan pula bahwa kinerja sosial perusahaan hanya dalam bentuk kegiatan filantropis dan mengabaikan adanya komitmen terhadap kinerja sosial pada konsumen dan pemasok. Lebih lanjut dinyatakan bahwa banyak investor institusional yang tidak mempertimbangkan kinerja sosial perusahaan sebagai bagian dari keputusan investasi yang diambil.

Djakman dan Machmud (2008) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan menyatakan bahwa kepemilikan institusi belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi. Sehingga investor institusional cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail. Demikian pula yang ditemukan oleh Rawi dan Muchlish (2010) yang kemudian menyatakan bahwa

pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak selalu luas.

Serta Muniandy dan Barnes (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh terhadap kepemilikan institusional. Investor institusional lebih memilih melakukan penanaman modal pada perusahaan besar. Meskipun indeks kinerja sosial perusahaan rendah, investor institusional tetap memiliki saham perusahaan dalam jumlah besar dan meskipun indeks kinerja sosial perusahaan naik, hal ini tidak membuat perbedaan pada investasi yang dilakukan investor institusional.

## **2.1.7 Variabel Eksogen**

### **2.1.7.1 Tipe Industri**

Menurut Utomo (2000), para peneliti akuntansi sosial tertarik untuk menguji pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe industri, yaitu industri yang *high profile* dan *low profile*.

Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri *high profile* merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap lingkungan, tingkat risiko politik yang tinggi, atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000). Selain itu, perusahaan yang termasuk kategori *high profile* umumnya merupakan perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasi perusahaan memiliki potensi dan kemungkinan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Industri *high profile* diyakini

melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri yang *low profile*. Adapun perusahaan yang tergolong dalam industri *high profile* pada umumnya memiliki karakteristik seperti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi (Zuhroh dan Sukmawati, 2003).

Fauzi *et al.* (2007) menemukan bukti empiris bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Sementara Djakman dan Machmud (2008) menemukan bukti empiris bahwa tipe industri memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial.

Pada penelitian ini, perusahaan yang dikategorikan sebagai *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata. Sedangkan kelompok industri *low profile* terdiri dari bangunan, keuangan dan perbankan, *supplier* peralatan medis, properti, *retailer*, tekstil dan produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga (Utomo, 2000 dan Sembiring, 2006).

#### **2.1.7.2 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang umum digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Berkembang suatu fenomena bahwa pengaruh total aktiva (proksi dari ukuran perusahaan) hampir selalu konsisten dan secara signifikan

berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan. Hal ini dibuktikan oleh Cooke (1989 dalam Pian, 2010) yaitu perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan juga merupakan variabel yang penting dalam praktik CSR dan berperan seperti barometer yang menjelaskan mengapa perusahaan terlibat dalam praktik CSR (Gardiner *et al.*, 2003 dan Seifert *et al.*, 2003 dalam Saleh, *et al.* 2010). Selain itu, juga dinyatakan bahwa CSR hanya akan tampak berbeda apabila konsep CSR terintegrasi dengan prinsip dan praktik perusahaan dan ketika kemajuan pelaksanaan CSR secara teratur dilakukan *monitoring*. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2006). Penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR diantaranya adalah Fauzi, *et al.* (2007) dan Djakman dan Machmud (2008).

Ukuran perusahaan digunakan pula dalam penelitian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional. Adapun alasan yang mendasari hal tersebut diantaranya adalah dikarenakan perusahaan besar tidak terlalu menarik bagi investor institusional untuk melakukan penanaman modal semenjak investor institusional mengetahui bahwa kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut akan relatif kecil, maka investor institusional akan memiliki kemampuan yang terbatas untuk mempengaruhi manajemen

perusahaan (Graves dan Waddock, 1994). Selain itu, investasi pada perusahaan kecil hanya akan dapat berjalan untuk investor kecil atau institusi yang mengelola dana yang tidak terlalu besar jumlahnya. Sebagai tambahan, putusan klien untuk menempatkan batas maksimum atau tertinggi terhadap persentase kepemilikan saham yang memungkinkan untuk dimiliki setiap perusahaan, akan membatasi investasi oleh perusahaan besar dimana batas maksimum kepemilikan yang telah ditetapkan tersebut tidak akan dilanggar (Cox, *et al.*, 2004).

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap kepemilikan institusional adalah penelitian oleh Cox, *et al.* (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa investor institusional yang memiliki orientasi kepemilikan dalam jangka panjang memiliki kepemilikan saham yang besar pada perusahaan-perusahaan besar sementara kepemilikan saham oleh investor institusional dengan orientasi kepemilikan saham jangka pendek cenderung tinggi pada perusahaan berukuran kecil. Selain itu, penelitian terdahulu yang juga menemukan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap kepemilikan institusional adalah penelitian oleh Muniandy dan Barnes (2010) dan Saleh, *et al.* (2010). Muniandy dan Barnes (2010) yang tidak menemukan bukti empiris kinerja sosial perusahaan berpengaruh terhadap kepemilikan institusional menyatakan bahwa tidak satu pun dimensi atau tema kinerja sosial perusahaan yang berpengaruh terhadap kepemilikan institusional pada perusahaan *go public* di Malaysia dan menyatakan bahwa institusi lebih memilih melakukan penanaman modal pada perusahaan besar.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aktiva. Adapun alasan penggunaan proksi ini juga mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Munif (2010) yang dalam penelitiannya menggunakan pula variabel ukuran perusahaan. Dalam penelitian tersebut, yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pengungkapan CSR dengan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, peneliti menggunakan nilai kapitalisasi pasar sebagai proksi ukuran perusahaan. Namun, setelah dilakukan penelitian, proksi tersebut tidak mempengaruhi indeks pengungkapan CSR dan dinyatakan oleh peneliti hasil tersebut kurang valid. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan total aktiva dalam mengukur ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah perolehan hasil yang kurang valid karena pengukuran dengan total aktiva tidak terpengaruh oleh pasar sehingga dapat menghasilkan data yang valid.

### **2.1.7.3 Profitabilitas**

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Anggraini, 2006). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan menarik investor institusional untuk melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut. Dengan diperkirakannya arus laba dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja pasar dari saham perusahaan, dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan institusional dengan profitabilitas (Graves dan Waddock, 1994; Johnson dan Greening, 1999 dalam Cox, *et al.*, 2010).

Pada penelitian ini, kemampuan perusahaan menghasilkan laba diukur dengan menggunakan rasio *return on asset* (ROA). ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aktiva tertentu atau dapat dikatakan pula bahwa ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aktiva yang digunakan. Menurut Darsono dan Ashari (2005), dengan mengetahui ROA perusahaan, dapat menilai apakah perusahaan tersebut efisien dalam memanfaatkan aktiva pada kegiatan operasional perusahaan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva dalam upaya memperoleh pendapatan. ROA diperoleh dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva.

Fauzi, *et al.* (2007) menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara ROA dengan *corporate social performance* yang kemudian menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki tingkat ROA yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki dana yang cukup untuk dialokasikan kepada

kegiatan sosial dan lingkungan sehingga tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan akan tinggi.

Penelitian oleh Graves dan Waddock (1994), Cox, *et al.* (2004), dan Muniandy dan Barnes (2010) menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas dengan kepemilikan institusional. Profitabilitas yang merupakan ukuran untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi keputusan penanaman modal oleh investor institusional.

#### **2.1.7.4 Leverage**

Pengukuran *leverage* terkait dengan bagaimana perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Hal ini merupakan suatu hal yang penting bagi investor yang melakukan penanaman modal dalam perusahaan. Investor, dalam pengambilan keputusan terkait penanaman modal pada suatu perusahaan, perlu mempertimbangkan bagaimana kemampuan finansial perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin dalam tingkat *leverage* perusahaan.

Menurut Helfert (1997), *leverage* keuangan terjadi apabila struktur modal suatu perusahaan mengandung kewajiban dengan suku bunga yang tetap. Dijelaskan lebih lanjut bahwa penggunaan kewajiban yang optimal akan meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan. Hal ini dikarenakan pengembalian

dari dana tersebut melebihi bunga yang harus dibayar dan menjadi hak pemilik, yang berarti meningkatkan ekuitas pemilik.

Namun, dari sudut pandang pemberi pinjaman, jika laba tidak ada atau bahkan untuk biaya bunga ternyata kurang, komitmen bunga dan pokok pinjaman harus tetap dipenuhi. Helfert (1997) menyatakan bahwa pengaruh positif dan negatif dari *leverage* meningkat berdasarkan proporsi hutang dalam suatu perusahaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberi hutang dan pemilik akan menanggung risiko.

Apabila dikaitkan pengaruhnya terhadap kepemilikan institusional, *leverage* dapat digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap adanya kemungkinan tingkat risiko kebangkrutan (*insolvency*) yang tinggi dari perusahaan yang berhutang yang dapat menghalangi kepemilikan saham oleh investor institusional (Chaganti dan Damanpour, 1991 dalam Cox, *et al.*, 2004). Tingkat *leverage* yang tinggi akan membuat manajemen berkomitmen pada usaha untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dan dengan demikian akan menurunkan biaya keagenan melalui pengaruh yang bersifat memotivasi manajemen (Duke dan Hunt, 1990 dalam Cox, *et al.*, 2004) atau tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi kemampuan manajer untuk memprioritaskan pertumbuhan eksternal melalui *merger* dan akuisisi daripada melalui peningkatan profitabilitas (Myers, 1984, Weston *et al.*, 2001 dalam Cox, *et al.*, 2004). Sehingga berkembang argumen bahwa sebaiknya investor institusional melakukan penanaman modal pada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi (Cox, *et al.*, 2004).

Graves dan Waddock (1994) menyatakan bahwa investor institusional cenderung merupakan tipe investor *risk aversion* sehingga memilih melakukan penanaman modal pada perusahaan dengan tingkat hutang atau *leverage* yang rendah. Hal ini ditunjukkan melalui hasil penelitian yang dilakukan yaitu bahwa tingkat hutang perusahaan berhubungan negatif namun signifikan terhadap kepemilikan institusional baik itu yang diprosikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan maupun dengan persentase kepemilikan oleh institusi dan menyatakan bahwa investor institusional lebih memilih melakukan investasi pada perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah.

Saleh *et al.* (2010) menemukan bukti empiris bahwa *leverage* berhubungan negatif namun signifikan terhadap kepemilikan insitusional yang diprosikan dengan persentase kepemilikan oleh institusi dan menemukan bukti empiris bahwa *leverage* berhubungan positif dan signifikan terhadap kepemilikan institusional yang diprosikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan. Berbeda dengan yang ditemukan oleh Cox, *et al.* (2004) yaitu bahwa *leverage* berhubungan positif namun tidak signifikan terhadap kepemilikan institusional.

Pada penelitian ini, *leverage* diukur dengan rasio total hutang terhadap total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*-DER). Rasio total hutang terhadap total ekuitas didefinisikan sebagai upaya untuk memperlihatkan proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan hutang (Helfert, 1997). Rasio ini juga menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Darsono dan

Ashari, 2005). Semakin tinggi DER, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. DER dihitung dengan membandingkan total hutang dengan total ekuitas.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang memiliki topik penelitian pada kinerja sosial perusahaan atau pertanggungjawaban sosial perusahaan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Topik penelitian pada penelitian ini diambil oleh peneliti berdasarkan pada adanya penelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian pada pengujian berkaitan dengan dua variabel utama pada penelitian ini yaitu pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure-CSR*) dan kepemilikan insitusional (*Institutional Ownership-IO*). Pada umumnya, penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial terhadap kepemilikan institusional dan pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial atau dapat dinyatakan bahwa penelitian terdahulu menempatkan kedua variabel utama tersebut sebagai variabel independen dan/atau variabel dependen.

Oleh karena itu, pada penelitian ini yang memiliki fokus penelitian pada hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional, menggunakan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel 2.1 yang menyajikan ringkasan penelitian terdahulu pada penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun Penelitian)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Graves dan Waddock (1994)	a. Variabel dependen: kepemilikan institusional b. Variabel independen: kinerja sosial perusahaan ( <i>corporate social performance</i> ) c. Variabel kontrol: profitabilitas, ukuran perusahaan, tingkat hutang	a. Terdapat hubungan positif dan signifikan kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional b. Keterlibatan perusahaan dalam kinerja sosial tidak memberikan tanggapan yang negatif dari investor institusional c. Profitabilitas dan ukuran perusahaan (yang diproksikan dengan jumlah institusi yang melakukan investasi pada perusahaan) berhubungan positif dan signifikan dengan kepemilikan institusional d. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan persentase institusi yang melakukan investasi pada perusahaan berhubungan negatif dan tidak signifikan dengan kepemilikan institusional e. Tingkat hutang berhubungan negatif signifikan dengan kepemilikan institusional
2.	Cox, <i>et al.</i> (2004)	a. Variabel dependen: kepemilikan institusional b. Variabel independen: kinerja sosial perusahaan	a. Investasi oleh investor institusional jangka panjang berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja sosial perusahaan b. Ukuran perusahaan dan profitabilitas

		<p>(<i>corporate social performance</i>)</p> <p>c. Variabel kontrol: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas</p>	<p>berhubungan signifikan dan positif dengan kepemilikan institusional</p> <p>c. <i>Leverage</i> berhubungan positif namun tidak signifikan dengan kepemilikan institusional</p>
3.	Fauzi, <i>et al.</i> (2007)	<p>a. Variabel dependen: kinerja sosial perusahaan (<i>corporate social performance</i>)</p> <p>b. Variabel independen: kepemilikan institusional</p> <p>c. Variabel kontrol: Kinerja keuangan (ROA dan ROE), ukuran perusahaan, tipe industri</p>	<p>a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan</p> <p>b. Kinerja keuangan (ROA dan ROE) dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan</p> <p>c. Tipe industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan</p>
4.	Mahoney dan Robert (2007)	<p>a. Variabel dependen: kepemilikan institusional, kinerja keuangan perusahaan</p> <p>b. Variabel independen: kinerja sosial perusahaan (<i>corporate social performance</i>)</p>	<p>a. Terdapat hubungan signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan kepemilikan institusional</p>

5.	Djakman dan Machmud (2008)	<p>a. Variabel dependen: CSR</p> <p>b. Variabel independen: kepemilikan institusional, kepemilikan asing</p> <p>c. Variabel kontrol: tipe industri, ukuran perusahaan, kategori BUMN dan non-BUMN</p>	<p>a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan</p> <p>b. Ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan</p>
6.	Muniandy dan Barnes (2010)	<p>a. Variabel dependen: kepemilikan institusional</p> <p>b. Variabel independen: kinerja sosial perusahaan (<i>corporate social performance</i>)</p> <p>c. Variabel kontrol: ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri</p>	<p>a. Kinerja sosial perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional</p> <p>b. Investor institusional lebih memilih melakukan investasi pada perusahaan besar daripada perusahaan yang 'baik' (<i>good firms</i>)</p> <p>c. Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepemilikan institusional</p>

7.	Rawi dan Muchlish (2010)	<p>a. Variabel dependen: CSR</p> <p>b. Variabel independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, <i>leverage</i></p> <p>c. Variabel kontrol: total aktiva, nilai pasar terhadap nilai buku, perubahan <i>return</i>, umur perusahaan</p>	<p>a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR</p> <p>b. Total aktiva tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR</p>
8.	Saleh, <i>et al.</i> (2010)	<p>a. Variabel dependen: kepemilikan institusional (jumlah institusi dan persentase kepemilikan oleh institusi)</p> <p>b. Variabel independen: pengungkapan CSR, dimensi-dimensi pengungkapan CSR (<i>employee relations, community involvement, product, dan environment</i>)</p> <p>c. Variabel kontrol: risiko sistematis, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, perputaran aktiva, <i>earning per share</i> (EPS)</p>	<p>a. Pengungkapan CSR memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepemilikan institusional</p> <p>b. Ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan dengan kepemilikan institusional</p> <p>c. <i>Leverage</i> berhubungan positif dan tidak signifikan dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan persentase kepemilikan institusional dan berhubungan positif signifikan dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan</p>

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2011

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat dan lingkungan perlu menunjukkan dan memiliki komitmen terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan tersebut, perusahaan melakukan suatu pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility-CSR*). Pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*). *Stakeholder* memerlukan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengungkapan (*disclosure*) terkait praktik CSR yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pengungkapan melalui laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Para *stakeholder* berhak untuk mengetahui semua informasi baik bersifat *mandatory* maupun *voluntary* serta informasi keuangan dan non-keuangan. Sehingga apa yang dilakukan perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perusahaan sendiri tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* (Teori *Stakeholder*).

Demikian pula dengan perusahaan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat. Dengan adanya kesesuaian dan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat dalam kegiatan perusahaan dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut, keberlangsungan dan keberlanjutan operasional perusahaan akan terjamin (Teori Legitimasi).

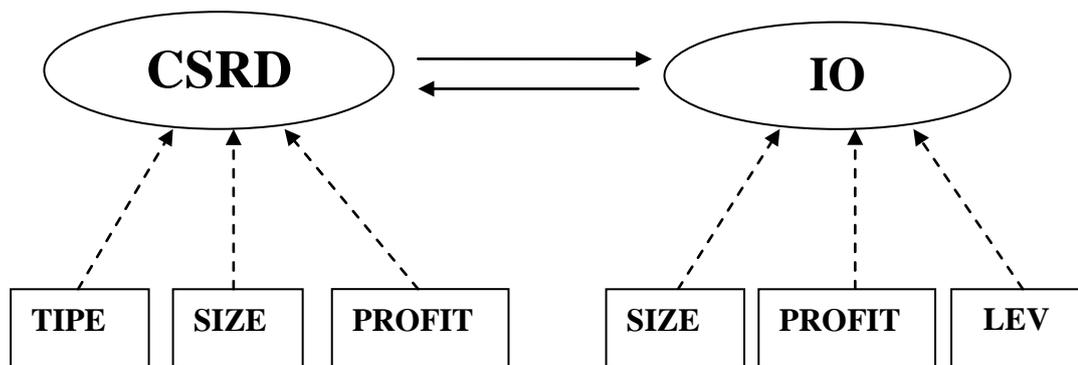
Pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*CSR Disclosure-CSR*) yang dilakukan perusahaan berguna dalam memberikan informasi berkaitan dengan praktik CSR perusahaan kepada pemegang saham. Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan terbukti berpengaruh terhadap reaksi investor yaitu yang dibuktikan dengan *volume* perdagangan saham yang meningkat (Zuhroh dan Sukmawati, 2003).

Salah satu struktur kepemilikan saham dalam perusahaan adalah kepemilikan oleh institusi (*Institutional Ownership-IO*), dengan kepemilikan saham cukup besar dalam perusahaan dapat melakukan *monitoring* kepada manajemen. Sehingga dapat mengarahkan manajemen pada penekanan pelaksanaan pengungkapan pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan (*annual report*).

Dalam pengambilan keputusan penanaman modal dalam suatu perusahaan, investor institusional mempertimbangkan bagaimana pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang rendah dipandang sebagai investasi yang berisiko bagi investor institusional. Investor institusional tidak hanya mempertimbangkan kondisi keuangan, dikarenakan pada masa sekarang telah berkembang suatu kondisi perekonomian yang mempertimbangkan pula kondisi sosial dan lingkungan terkait dengan adanya konsep *triple bottom line* yaitu yang menekankan adanya konsep *profit*, *people*, dan *planet*. Sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga harus ada kontribusi dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Berikut adalah kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian**



Keterangan:

—————> : Variabel Endogen

- - - - -> : Variabel Eksogen

## 2.4 Hipotesis

Graves dan Waddock (1994) menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dengan kepemilikan institusional yang diproksikan dengan jumlah institusi yang memiliki saham perusahaan dan terdapat hubungan positif namun tidak signifikan antara kinerja sosial perusahaan dengan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Serta menyatakan bahwa dengan adanya kinerja

sosial pada perusahaan, tidak memberikan tanggapan yang negatif dari investor institusional.

Cox, *et al.* (2004) menemukan bukti empiris bahwa investasi oleh investor institusional yang memiliki orientasi kepemilikan dalam jangka panjang berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dan menyatakan bahwa investor institusional lebih memilih untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki praktik kinerja sosial yang bagus.

Mahoney dan Robert (2007) menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dengan kepemilikan institusional. Demikian pula Saleh *et al.* (2010) yang menemukan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional dan menyatakan bahwa investor institusional tertarik pada bagaimana manajer perusahaan menangani isu sosial yang berkembang di masyarakat dan mempertimbangkan perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada keputusan investasi yang akan diambil.

Namun, terdapat perbedaan dengan yang ditemukan oleh Fauzi *et al.* (2007) yaitu yang menemukan bukti empiris bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) dan menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait investasi yang akan dilakukan dalam suatu perusahaan, investor

institusional tidak mempertimbangkan kinerja sosial perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Djakman dan Machmud (2008) menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun, dan *asset management* di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi. Sehingga investor institusional cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail dalam laporan tahunan perusahaan. Demikian pula yang ditemukan oleh Rawi dan Muchlish (2010) yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Muniandy dan Barnes (2010) menemukan bukti empiris bahwa kinerja sosial perusahaan (*corporate social performance*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional dan menyatakan bahwa investor institusional lebih memilih melakukan investasi pada perusahaan yang besar daripada melakukan investasi pada perusahaan yang 'baik' (*good firm*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat penelitian yang berfokus pada hubungan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional dan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional. Selain itu, dengan

berdasarkan pada kerangka pemikiran bahwa kegiatan pertanggungjawaban sosial dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan dalam *annual report* bertujuan untuk memenuhi tuntutan *stakeholder* terhadap perusahaan, memberikan suatu transparansi kepada *stakeholder*, dan memperoleh legitimasi sosial, sehingga diharapkan dapat menarik investor institusional untuk melakukan penanaman modal pada perusahaan. Serta, dengan berdasarkan pula pada kerangka pemikiran bahwa kepemilikan saham oleh institusi semakin dilirik oleh pelaku bisnis pada masa sekarang daripada kepemilikan oleh investor individual karena memiliki orientasi investasi dalam jangka panjang dan dengan berdasarkan kerangka pemikiran bahwa kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) dalam perusahaan dapat melakukan *monitoring* kepada manajemen sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial dalam *annual report*.

Sementara Spicer (1978 dalam Graves dan Waddock, 1994) menyatakan bahwa investor institusional mempertimbangkan kinerja sosial perusahaan yang rendah sebagai suatu investasi yang berisiko. Saleh *et al.* (2010) menyatakan bahwa merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui pengaruh informasi mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan pada level kepemilikan institusional sebagai suatu bukti empiris. Hal ini dikarenakan investor dapat memandang perusahaan dengan tingkat pertanggungjawaban sosial yang tinggi sebagai suatu tandingan yang superior dengan lingkungan sekitar perusahaan dan karena alasan tersebut, risiko investasi akan rendah dalam jangka panjang

(Simerly, 1995 dalam Saleh *et al.*, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Terdapat hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*) dengan kepemilikan institusional**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Pengujian terhadap hipotesis yang telah ditetapkan dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar memperoleh hasil yang akurat. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Endogen

Variabel endogen merupakan variabel yang ditentukan nilainya dalam model (Ghozali, 2006). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure-CSR*) dan kepemilikan institusional (*Institutional Ownership-IO*).

2. Variabel Eksogen

Variabel eksogen merupakan variabel yang nilainya ditentukan di luar model (Ghozali, 2006). Variabel eksogen pada penelitian ini dipilih untuk mengendalikan atau mengontrol variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

#### **3.1.2.1 Variabel Endogen**

##### **1. Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial (CSR Disclosure-CSRD)**

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diukur dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan (*annual report*). Daftar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan daftar pengungkapan yang terdapat dalam penelitian oleh Sembiring (2006) yang berjumlah 78 *item* yang terdiri dari tema Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lain-lain tentang Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum. Dalam penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa tujuh puluh delapan *item* pengungkapan pertanggungjawaban sosial tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Bapepam No. VIII. G.2 tentang laporan tahunan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia serta telah disesuaikan pula dengan masing-masing sektor industri. Penelitian terdahulu yang menggunakan pula daftar pengungkapan pertanggungjawaban sosial ini adalah Rawi dan Muchlish (2010).

Namun demikian, penelitian ini melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap daftar pengungkapan pertanggungjawaban sosial tersebut. Dengan mempertimbangkan pula daftar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang terdapat pada penelitian oleh Utomo (2000) dan Saleh *et al.* (2010) yaitu yang memasukkan *item* pelayanan pelanggan (*customer service*) dalam daftar pengungkapan yang digunakan, penelitian ini menambahkan *item* Pelayanan

Pelanggan pada tema Produk. Sehingga tema Produk menjadi tema Produk dan Konsumen. Penambahan *item* pengungkapan pertanggungjawaban sosial ini didasarkan pada argumen bahwa kegiatan perusahaan tidak dapat terlepas dari konsumen dan adanya pertanggungjawaban perusahaan kepada konsumen yaitu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan dan/atau keinginan konsumen.

Selain itu, pada penelitian ini tidak memasukkan tema Umum yang terdapat dalam Sembiring (2006) ke dalam daftar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang digunakan. Adapun alasan tidak digunakannya tema Umum yang terdiri dari dua *item* pengungkapan tersebut adalah agar tidak terjadi pengukuran dan pencatatan ganda dalam mengukur indeks pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Sehingga jumlah *item* pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 77 *item*.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* untuk mengukur pengungkapan pertanggungjawaban sosial. *Content analysis* merupakan suatu metode yang dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam suatu media pelaporan, merupakan metode analisis teks yang cukup handal, dan bertujuan untuk menjelaskan variabel dari gejala yang nyata bukan untuk memahami suatu fenomena (Rahardjo, 2010). *Content analysis* telah digunakan pada penelitian terdahulu tentang pengukuran pertanggungjawaban sosial seperti Sembiring (2006), Sayekti dan Wondabio (2007), Djakman dan Machmud (2008), Rawi dan Muchlish (2010), dan Saleh, *et al.* (2010).

Pendekatan untuk menghitung indeks pengungkapan pertanggungjawaban sosial menggunakan variabel *dummy* yaitu setiap *item* pengungkapan dalam instrumen penelitian akan diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa *et al.*, 2005 dalam Rawi dan Muchlish, 2010). Selanjutnya skor dari setiap *item* dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan indeks pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*Corporate Social Responsibility Disclosure Index-CSRDI*) adalah sebagai berikut:

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$  : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$n_j$  : jumlah *item* untuk perusahaan j,  $n_j \leq 77$

$X_{ij}$  : *dummy variable*: 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan

## 2. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership-IO*)

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Djakman dan Machmud, 2008 dan Saleh, *et al.*, 2010). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional menggunakan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh institusi yaitu sebesar lebih dari 5% saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi (Djakman dan Machmud, 2008) yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan pada tahun 2009. Apabila dalam suatu perusahaan terdapat kepemilikan

institusional lebih dari satu, maka dilakukan penjumlahan atau menghitung total persentase kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat dalam perusahaan tersebut.

### **3.1.2.2 Variabel Eksogen**

#### **1. Tipe Industri**

Tipe industri diproksikan dengan perusahaan yang termasuk dalam industri *high profile*. Perusahaan yang termasuk klasifikasi industri *high profile* antara lain perusahaan perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), *engineering*, kesehatan serta transportasi dan pariwisata. Tipe industri diukur dengan menggunakan *dummy variable* yaitu diberi skor 1 apabila perusahaan termasuk dalam industri *high profile* dan skor 0 apabila perusahaan termasuk dalam industri *low profile* (Sembiring, 2006).

#### **2. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sebagai proksi ukuran perusahaan, penelitian ini menggunakan *log of total assets* yaitu logaritma natural jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Data mengenai total aktiva perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2009 yaitu Neraca pada sisi Aktiva.

### 3. Profitabilitas

Sebagai proksi dari profitabilitas, penelitian ini menggunakan rasio *return on asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aktiva yang digunakan dan memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva dalam upaya memperoleh pendapatan (Darsono dan Ashari, 2005). Data ROA diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2009 yaitu Laporan Laba Rugi untuk data laba bersih dan Neraca untuk data total aktiva. Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

### 4. Leverage

*Leverage* diukur dengan menggunakan rasio total hutang terhadap total ekuitas (*debt to equity ratio*-DER). DER didefinisikan sebagai upaya untuk memperlihatkan proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan hutang (Helfert, 1997) dan juga menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Darsono dan Ashari, 2005). Data DER perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan tahun 2009 yaitu Neraca pada sisi Kewajiban untuk data total hutang dan sisi Ekuitas untuk data total ekuitas. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio total hutang terhadap total ekuitas (DER)} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Definisi	Skala	Pengukuran
I.	<p><u>Variabel Endogen:</u></p> <p>1. Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial (<i>Corporate Social Responsibility Disclosure-CSR</i>D)</p> <p>2. Kepemilikan institusional (<i>Institutional Ownership-IO</i>)</p>	<p>– Indeks pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan</p> <p>– <i>Item</i> pengungkapan CSR terdiri dari 77 <i>item</i> yang mengacu pada daftar <i>item</i> pengungkapan CSR yang terdapat pada penelitian oleh Utomo (2000), Sembiring (2006), dan Saleh <i>et al.</i> (2010).</p> <p>– <i>Item-item</i> pengungkapan CSR ditelusur ke seluruh bagian <i>annual report</i> perusahaan</p> <p>– Kepemilikan saham perusahaan sebesar lebih dari 5% oleh institusi</p> <p>– Data mengenai kepemilikan saham perusahaan</p>	<p>Rasio</p> <p>Rasio</p>	<p>Indeks pengungkapan CSR:</p> $CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$ <p>Keterangan: CSRDI<sub>j</sub>: <i>Corporate Social Responsibility Disclosure Index</i> perusahaan</p> <p>n<sub>j</sub>: jumlah <i>item</i> untuk perusahaan j, n<sub>j</sub> ≤ 77</p> <p>X<sub>ij</sub>: <i>dummy variable</i>: 1 = jika <i>item</i> i diungkapkan; 0 = jika <i>item</i> i tidak diungkapkan</p> <p>Total persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi</p>

		diperoleh dari laporan tahunan ( <i>annual report</i> ) perusahaan		
II.	<u>Variabel Eksogen</u>			
	1. Tipe Industri (TIPE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tipe industri diproksikan dengan perusahaan yang termasuk dalam industri <i>high profile</i></li> <li>– Klasifikasi industri <i>high profile</i> terdiri dari industri perminyakan dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), <i>engineering</i>, kesehatan serta transportasi dan pariwisata.</li> </ul>	Nominal	<i>Dummy variable:</i> 1 = jika perusahaan termasuk dalam tipe industri <i>high profile</i> ; 0 = jika perusahaan termasuk dalam industri <i>low profile</i>
	2. Ukuran Perusahaan (SIZE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ukuran perusahaan diproksikan dengan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan</li> <li>– Data mengenai</li> </ul>	Rasio	Logaritma natural total aktiva

		total aktiva perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yaitu pada Neraca		
	3. Profitabilitas (PROFIT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Profitabilitas diproksikan dengan rasio <i>return on asset</i> (ROA)</li> <li>– Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yaitu data laba bersih diperoleh dari Laporan Laba Rugi dan data total aktiva diperoleh dari Neraca</li> </ul>	Rasio	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$
	4. <i>Leverage</i> (LEV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Leverage</i> diproksikan dengan rasio total hutang terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>-DER)</li> <li>– Data mengenai total hutang dan total ekuitas perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yaitu pada Neraca</li> </ul>	Rasio	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$

Sumber: Diolah Peneliti, 2011

### 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Adapun alasan pemilihan sektor non-keuangan adalah aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan di sektor non-keuangan cenderung memiliki dampak bagi lingkungan dan perusahaan di sektor non-keuangan memiliki *volume* perdagangan dan jumlah saham beredar yang lebih besar dibandingkan sektor keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) tahun 2009, jumlah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 adalah 327 perusahaan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mengharapkan mendapatkan informasi dari kelompok sasaran spesifik (Sekaran, 2006) serta untuk memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009.
2. Perusahaan termasuk dalam sektor non-keuangan.
3. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) lengkap pada tahun 2009.
4. Perusahaan tidak mengalami kerugian pada tahun 2009.
5. Perusahaan memiliki kepemilikan institusional dengan persentase lebih dari 5%.

6. Laporan keuangan perusahaan dinyatakan dalam satuan mata uang Rupiah.

Penelitian ini tidak memasukkan perusahaan yang mengalami kerugian sebagai sampel penelitian dikarenakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam data yang dapat mempengaruhi pengujian statistik pada penelitian ini.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yaitu melalui media atau perantara lain yang telah disediakan atau dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Alasan pemilihan pemakaian data sekunder dibandingkan data primer adalah data sekunder lebih mudah diperoleh, biaya yang lebih murah, adanya penelitian terdahulu yang menggunakan data sekunder, dan lebih dapat dipercaya keabsahannya, seperti laporan keuangan, yang terdapat dalam *annual report*, telah diaudit oleh akuntan publik.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) perusahaan tahun 2009. Adapun alasan digunakannya laporan tahunan tahun 2009 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa data tersebut relatif baru. Sehingga dapat menunjukkan praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial terkini oleh perusahaan non-keuangan di Indonesia. Data dapat diperoleh karena perusahaan *go public* mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan tahunan (*annual report*) kepada pihak eksternal perusahaan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder kemudian dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari *website* resmi perusahaan, *website* BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) 2009, dan Pojok BEI Undip.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan meliputi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai tertinggi, dan nilai terendah (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi informasi yang jelas dan mudah dipahami.

#### **3.6 Uji Hipotesis**

Penelitian ini mengembangkan model persamaan simultan untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan. Model simultan terdiri dari lebih dari satu variabel tidak bebas (*endogenous variable*) dan lebih dari satu persamaan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan lebih dari satu persamaan yaitu persamaan pengungkapan pertanggungjawaban sosial (*CSR Disclosure-CSR*) dan kepemilikan institusional (*Institutional Ownership-IO*).

Model persamaan simultan berbeda dengan model persamaan tunggal. Model persamaan tunggal adalah model dengan satu variabel dependen Y dan satu atau lebih variabel independen X dan memiliki arah hubungan sebab-akibat hanya satu arah. Sedangkan pada model persamaan simultan, variabel endogen dalam salah satu persamaan dimungkinkan muncul pada persamaan lain dalam sistem atau dapat dikatakan bahwa setiap persamaan *mutually* atau *jointly* tergantung, dapat digunakan untuk menganalisis hubungan dua arah atau timbal balik antara variabel Y dan X, dan estimasi parameter terhadap satu persamaan harus mempertimbangkan pula informasi yang disediakan oleh persamaan lainnya dalam sistem tersebut (Ghozali, 2009).

Karena variabel dependen (*endogenous*) yang dihipotesiskan secara simultan dipengaruhi oleh variabel independen lain (termasuk variabel dependen pada persamaan lain), maka dilakukan uji *Two-Stage Least Square* (2SLS) dengan bantuan program SPSS 17.0. Ghozali (2009) menyatakan bahwa bila digunakan regresi biasa (*Ordinary Least Square*-OLS) dimana variabel dependen ditentukan secara simultan, akan menyebabkan taksiran yang bias, tidak konsisten, dan akan menghasilkan estimasi yang tidak valid karena pada persamaan simultan variabel penjelas yang berasal dari variabel endogen berkorelasi dengan *error term*. Model OLS juga tidak mampu menggambarkan hubungan timbal balik dalam sistem persamaan simultan. Oleh karena itu, metode 2SLS lebih tepat digunakan untuk analisis simultan, mengingat dalam analisis ini semua variabel diperhitungkan dengan suatu sistem secara menyeluruh.

Jika pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan kepemilikan institusional saling terkait satu sama lain, maka pengungkapan pertanggungjawaban sosial haruslah merupakan fungsi dari kepemilikan institusional setelah dilakukan pengontrolan atas faktor-faktor lain. Demikian pula kepemilikan institusional haruslah merupakan fungsi dari pengungkapan pertanggungjawaban sosial setelah dilakukan pengontrolan atas faktor-faktor lain. Untuk menentukan apakah hal ini benar, maka dirumuskan model persamaan berikut ini :

$$\text{CSR D} = a_0 + a_1 \text{ IO} + a_2 \text{ TIPE} + a_3 \text{ SIZE} + a_4 \text{ PROFIT} + e_1 \dots \dots \dots \text{(I)}$$

$$\text{IO} = b_0 + b_1 \text{ CSR D} + b_2 \text{ SIZE} + b_3 \text{ PROFIT} - b_4 \text{ LEV} + e_2 \dots \dots \dots \text{(II)}$$

Keterangan :

- CSR D : Pengungkapan pertanggungjawaban sosial
- IO : Kepemilikan institutional
- TIPE : Tipe industri
- SIZE : Ukuran perusahaan
- PROFIT : Profitabilitas
- LEV : *Leverage*
- a0 & b0 : Konstanta (*intercept*)
- a1 – a4 : Koefisien regresi
- b1 – b4 : Koefisien regresi
- e1 - e2 : *error*

### 3.6.1 Pengujian Identifikasi

Sebelum melakukan uji 2SLS, setiap persamaan harus memenuhi persyaratan identifikasi. Suatu persamaan dikatakan *identified* hanya jika

persamaan tersebut dinyatakan dalam bentuk statistik unik dan menghasilkan taksiran parameter yang unik. Masalah identifikasi berkaitan dengan apakah estimasi numerik parameter persamaan struktural dapat diperoleh dari mengestimasi koefisien persamaan *reduced form*. Jika dapat memperoleh estimasi numerik parameter persamaan struktural, maka persamaan tersebut disebut *identified*. Sebaliknya, jika tidak dapat memperoleh hasil estimasi parameter persamaan struktural, maka persamaan ini disebut *unidentified* atau *underidentified*. Persamaan yang *identified* dapat dikelompokkan menjadi *exactly (just atau fully) identified* atau *overidentified*. *Exactly identified* jika dapat diperoleh satu nilai angka unik parameter persamaan struktural sedangkan *overidentified* jika dapat diperoleh lebih dari satu nilai unik untuk beberapa parameter persamaan struktural. Berikut adalah kriteria untuk menentukan apakah suatu persamaan dapat dikatakan *identified* (Ghozali, 2009):

#### Kriteria 1

Dalam model M persamaan simultan agar persamaan tersebut *identified*, maka persamaan ini harus mengeluarkan (*exclude*) paling tidak M-1 variabel (endogen maupun eksogen) yang muncul dalam model tersebut. Jika dikeluarkan lebih dari M-1, maka variabel tersebut *overidentified*.

#### Kriteria 2

Dalam model M persamaan simultan agar persamaan tersebut *identified*, maka jumlah variabel eksogen yang dikeluarkan dari persamaan tidak boleh lebih kecil dari jumlah variabel endogen yang dimasukkan dalam persamaan dikurangi 1 atau ditulis dengan rumus sebagai berikut:

$$(K - k) \geq (M - 1)$$

Jika  $(K - k) = (m - 1)$ , maka disebut *just* atau *exactly identified*

Jika  $(K - k) > (m - 1)$ , maka disebut *overidentified*.

Keterangan :

M : Jumlah variabel endogen dalam model

m : Jumlah variabel endogen pada persamaan tertentu

K : Jumlah variabel eksogen dalam model termasuk *intercept*

k : Jumlah variabel eksogen pada persamaan tertentu

### 3.6.2 Uji Simultanitas

Analisis ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan simultan antar persamaan. Analisis ini menguji apakah variabel endogen regressor berkorelasi dengan error atau tidak. Jika persamaan tidak ada hubungan simultanitas (*simultaneity problem*), maka *Ordinary Least Squares* estimator menghasilkan konsisten dan efisien estimator. Namun demikian sebaliknya jika ada hubungan simultan antar persamaan, OLS bukanlah suatu estimator yang efisien dan konsisten. Metode *Two-Stage Least Square* (2SLS) dan variabel instrumental akan memberikan hasil estimasi yang konsisten dan efisien (Ghozali, 2009).

Masalah simultanitas timbul karena beberapa variabel endogen *regressor* berkorelasi dengan *error* atau *disturbance*. Sehingga langkah ini dapat digunakan untuk menentukan apakah metode 2SLS bisa dilakukan atau tidak. Hausman mengajukan suatu uji yang disebut *Hausman's specification error test* (Ghozali,

2009). Berikut adalah langkah-langkah uji Hausman:

1. Regres IO terhadap TIPE, SIZE, PROFIT, dan LEV untuk mendapatkan nilai *predicted error*.
2. Regres CSRD terhadap TIPE, SIZE, PROFIT dan nilai *predicted error*.
3. Lakukan uji t untuk koefisien *predicted error* dengan hipotesis nol: tidak ada hubungan simultan antara CSRD dan IO.

Jika nilainya signifikan, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada hubungan simultan antara CSRD dan IO. Namun, jika hasilnya tidak signifikan, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti tidak ada hubungan simultan antara CSRD dan IO.

### **3.6.3 Uji *Two-Stage Least Square* (2SLS)**

Uji 2SLS dilakukan untuk melihat lebih jelas mengenai hubungan simultan yang terbentuk yaitu apakah hanya berpengaruh pada satu arah atau pada dua arah sekaligus. Sehingga uji 2SLS ini akan dilakukan apabila hasil uji Hausman menunjukkan adanya hubungan simultan antara kedua variabel endogen.

Pada kasus dimana persamaan *overidentified*, metode *reduced form* tidak dapat digunakan untuk memperoleh *exact* estimasi secara tidak langsung oleh karena akan ada lebih dari satu solusi untuk memperoleh postulat parameter asli  $\alpha$  dan  $\beta$  dari estimasi koefisien persamaan *reduced form*. Solusinya harus menggunakan metode *Two-Stage Least Squares* (2SLS) (Ghozali, 2009). Berikut adalah langkah uji *Two-Stage Least Square* (2SLS):

- Regres masing-masing persamaan pengungkapan pertanggungjawaban sosial (CSR/D) dan kepemilikan institusional (IO) dengan memasukkan variabel dependen, independen, dan instrumental (variabel eksogen yang tidak berkorelasi dengan *error* atau residualnya) pada tempat masing-masing sehingga diperoleh hasil *Two-Stage Least Square*.

Jika hasil yang diperoleh signifikan, maka terdapat pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependennya.

### **3.7 Pengujian Model Regresi**

Pengujian dengan model regresi dilakukan apabila berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh hasil tidak adanya hubungan simultan antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional. Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis dan memberikan kejelasan mengenai hubungan yang terbentuk antara kedua variabel utama tersebut yaitu arah hubungan yang terbentuk antara kedua variabel endogen tersebut. Analisis regresi berganda dilakukan terhadap dua model persamaan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu model regresi I untuk pengujian pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan model regresi II untuk pengujian pengaruh pengungkapan pertanggungjawaban sosial terhadap kepemilikan institusional.

Pada model regresi I, terdiri dari variabel dependen adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial, variabel independen adalah kepemilikan institusional, dan variabel kontrol adalah tipe industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

Sedangkan pada model regresi II, variabel dependen adalah kepemilikan institusional, variabel independen adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial, dan variabel kontrol adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

Adapun yang dimaksud dengan variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang diperkirakan nilainya dan variabel independen adalah variabel yang menjadi penduga. Sedangkan variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Hasan, 2002).

### **3.7.1 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinieritas serta untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Akan tetapi, pada penelitian ini tidak menggunakan uji autokorelasi karena periode penelitian yang digunakan hanya satu tahun. Berikut adalah penjelasan mengenai uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **3.7.1.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Seperti

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, terdapat dua cara yang dapat dilakukan yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006).

Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan grafik *normal probability plot*. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak menunjukkan asumsi normalitas.

Untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas, tidak cukup memadai apabila hanya menggunakan analisis grafik. Hal ini dikarenakan hasil analisis dengan menggunakan grafik tersebut dapat menyesatkan apabila tidak berhati-hati yaitu data yang terlihat normal namun ternyata memiliki hasil yang sebaliknya. Oleh karena itu, uji normalitas dilengkapi pula dengan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

Sedangkan dasar pengambilan keputusan apakah model regresi memiliki distribusi normal dengan menggunakan uji K-S adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka Ho diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### 3.7.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinieritas, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan lawannya, *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Sehingga nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi, dikarenakan  $VIF = 1/Tolerance$ . Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai  $Tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$  (Ghozali, 2006).

### 3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dinamakan Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidak adanya suatu heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis atau pengambilan keputusan ada atau tidak adanya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2006):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji secara statistik yaitu dengan uji Glejser untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yang dikembangkan. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut

residual terhadap variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

### 3.7.2 Analisis Regresi

Untuk mengetahui hubungan yang terbentuk antara pengungkapan pertanggungjawaban sosial dengan kepemilikan institusional (*Institutional Ownership-IO*), digunakan analisis regresi. Model regresi yang diuji terdiri dari dua model regresi yaitu model regresi 1 dengan variabel dependen adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial, variabel independen adalah kepemilikan institusional, dan variabel kontrol adalah tipe industri, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sedangkan model regresi 2 terdiri dari variabel dependen adalah kepemilikan institusional, variabel independen adalah pengungkapan pertanggungjawaban sosial, dan variabel kontrol adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

Model regresi yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$\text{CSRD} = a_0 + a_1 \text{IO} + a_2 \text{TIPE} + a_3 \text{SIZE} + a_4 \text{PROFIT} + e_1 \dots \dots \dots \text{(I)}$$

$$\text{IO} = b_0 + b_1 \text{CSRD} + b_2 \text{SIZE} + b_3 \text{PROFIT} - b_4 \text{LEV} + e_2 \dots \dots \dots \text{(II)}$$

Keterangan :

CSRD : Pengungkapan pertanggungjawaban sosial

IO : Kepemilikan institusional

TIPE : Tipe industri

SIZE : Ukuran perusahaan

PROFIT : Profitabilitas

LEV : *Leverage*

- a0 & b0 : Konstanta (*intercept*)  
a1 – a4 : Koefisien regresi  
b1 – b4 : Koefisien regresi  
e1 - e2 : *error*

### 3.7.2.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, koefisien determinasi memiliki kelemahan mendasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga dianjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted*  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Adjusted*  $R^2$  berkisar antara nol dan satu. Jika nilai *Adjusted*  $R^2$  semakin mendekati satu, maka semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya (Ghozali, 2006).